

Membangun Literasi Digital Peserta Didik melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi Media Sosial

Ananda Pertiwi^{1*}, Natalen Risky Pramudika², Pajri Isnaini³, Raka Aidil Fikri⁴

^{a*,b,c,d}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, Kampus 2 Viktor, Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, Indonesia

Email: ^{1*}anandatiwi0@gmail.com; ²riskipramudika12@gmail.com; ³pajrikens@gmail.com;

⁴rakaaf44@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><i>Sejarah Artikel:</i> Diterima: 31 Agustus 2025 Direvisi: 15 September 2025 Disetujui: 24 September 2025 Tersedia Daring: 16 Oktober 2025</p> <hr/> <p>Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan Literasi Digital Media Sosial Globalisasi Pancasila</p>	<p>Perkembangan teknologi yang pesat di era globalisasi telah menempatkan media sosial sebagai ruang utama interaksi bagi generasi muda. Di satu sisi, media sosial memberikan peluang luas untuk belajar dan berpartisipasi secara kewarganegaraan; namun di sisi lain, juga membawa tantangan serius seperti lemahnya literasi digital, maraknya perundungan siber (cyberbullying), ujaran kebencian, dan disinformasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan literasi digital peserta didik agar mereka dapat menjadi warga digital yang cerdas dan beradab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan kajian pustaka terhadap berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan, literasi digital, dan kewarganegaraan digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam: (1) memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral, (2) meningkatkan literasi digital kritis untuk menangkal hoaks dan disinformasi, (3) membentuk kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab, dan (4) mendorong sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menumbuhkan praktik bermedia yang etis. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Pendidikan Kewarganegaraan di era digital merupakan langkah strategis untuk membentuk peserta didik yang cerdas, kritis, dan beradab di tengah dinamika globalisasi.</p>

ABSTRACT
<p>Keywords: Civic Education Digital Literacy Sosial Media Globalization Pancasila</p>

The rapid development of technology in the era of globalization has positioned social media as the main space of interaction for young generations. On the one hand, social media provides vast opportunities for learning and civic participation; on the other hand, it also brings serious challenges such as weak digital literacy, the prevalence of cyberbullying, hate speech, and disinformation. This study aims to explore the role of Civic Education in fostering students' digital literacy so that they can become intelligent and civilized digital citizens. The research employs a descriptive qualitative method based on a literature review of scholarly works related to Civic Education, digital literacy, and digital citizenship. The findings indicate that Civic Education plays a crucial role in: (1) strengthening Pancasila values as moral foundations, (2) enhancing critical digital literacy to counter hoaxes and disinformation, (3) shaping responsible digital citizenship, and (4) promoting synergy among schools, families, and communities in cultivating ethical media practices. These results highlight that strengthening Civic Education in the digital era is a strategic step to form students who are intelligent, critical, and civilized amidst the dynamics of globalization.



1. Pendahuluan

Era globalisasi telah mendorong transformasi besar dalam bidang teknologi dan komunikasi. Media sosial menjadi ruang dominan bagi generasi muda untuk berinteraksi, berekspresi, dan memperoleh informasi. Fenomena ini tidak hanya membuka peluang bagi partisipasi masyarakat dalam ruang publik digital, tetapi juga memunculkan berbagai tantangan serius. Kecepatan dan volume informasi di media sosial sering kali menyebabkan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten intoleran yang mudah tersebar. Kemampuan kritis peserta didik dalam memilah kebenaran informasi menjadi sangat krusial. Namun kenyataannya, literasi digital belum merata di kalangan pelajar Indonesia (Yemima et al., 2025).

Masalah literasi digital di kalangan pelajar kian nyata terlihat melalui maraknya penyebaran hoaks, praktik cyberbullying, ujaran kebencian, hingga perilaku intoleran di ruang digital. Penelitian menunjukkan bahwa hoaks dan ujaran kebencian merupakan tantangan utama yang dihadapi pelajar dalam interaksi daring, dan hal ini erat kaitannya dengan lemahnya kesadaran etika digital (Yemima et al., 2025). Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan terbukti dapat mendorong sikap kritis dan pembentukan moral digital siswa melalui penanaman nilai-nilai Pancasila (Alhudawi, 2024). Namun, belum banyak sekolah yang secara sistematis mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum PKn sehingga masih ada kesenjangan antara tuntutan era digital dan praktik pembelajaran.

Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis. PKn bukan hanya pengajaran pengetahuan politik dan hukum, tetapi juga instrumen pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, membentuk sikap kritis, dan membiasakan etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran berbasis saintifik, mahasiswa atau peserta didik dapat dilatih untuk memverifikasi informasi, berdiskusi, serta mengembangkan tanggung jawab sosial dalam aktivitas digital (Rahayu et al., 2023). Lebih lanjut, literasi digital dalam PKn menekankan keterkaitan erat antara etika digital dengan identitas warga negara digital yang bertanggung jawab (Nugraha, 2023).

Melalui PKn, peserta didik dibimbing untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, sekaligus menyadari pentingnya tanggung jawab dalam menggunakan media sosial secara bijak. Studi lain menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran PKn mampu meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya etika bermedia sosial serta motivasi belajar mereka (Yogi et al., 2025). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa transformasi pendidikan digital bukan hanya soal akses teknologi, tetapi juga kesadaran normatif tentang bagaimana berperilaku di ruang digital (Yemima et al., 2025). Dengan demikian, PKn dapat menjadi medium strategis bagi internalisasi nilai-nilai etika digital yang berbasis Pancasila.

Namun demikian, terdapat sejumlah kendala agar PKn bisa efektif membangun literasi digital. Salah satunya adalah keterbatasan kompetensi digital guru PKn yang masih fokus pada hafalan konstitusi. Selain itu, infrastruktur sekolah yang belum merata serta lemahnya integrasi materi literasi digital dalam silabus turut menjadi hambatan. Penelitian menemukan bahwa pembentukan karakter digital siswa akan lebih berhasil jika ada sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat (Alhudawi, 2024). Oleh karena itu, tantangan yang ada menuntut inovasi kurikulum PKn yang lebih adaptif terhadap dinamika globalisasi media sosial.

Sebagai solusi, pembaruan kurikulum PKn perlu memasukkan literasi digital sebagai

komponen utama. Materi PKn dapat difokuskan pada keterampilan mendeteksi hoaks, norma etika komunikasi daring, dan pemahaman dampak sosial dari aktivitas digital. Guru juga perlu dibekali dengan pelatihan literasi digital yang lebih aplikatif. Selain itu, peran keluarga dan komunitas harus dioptimalkan untuk membentuk budaya digital yang sehat, sehingga internalisasi nilai etika digital tidak berhenti di ruang kelas. Inovasi metode pembelajaran seperti simulasi, debat daring, dan proyek literasi digital dapat menjadi strategi efektif (Nugraha, 2023).

Dengan memperkuat literasi digital melalui Pendidikan Kewarganegaraan, generasi muda Indonesia dapat menjadi warganet yang cerdas, kritis, dan beradab. Jika nilai Pancasila dipadukan dengan keterampilan digital, maka media sosial tidak hanya menjadi ruang ekspresi, tetapi juga arena penguatan karakter bangsa. Pada akhirnya, keberhasilan PKn di era globalisasi teknologi dan media sosial diukur dari sejauh mana peserta didik mampu mempraktikkan etika digital dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar memahami teori (Rahayu et al., 2023).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dengan menelaah berbagai sumber akademik, baik jurnal nasional dan internasional, buku, maupun artikel ilmiah yang relevan dengan tema Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), literasi digital, dan pendidikan karakter. Proses penelitian dilakukan melalui empat tahap, yaitu: (1) pengumpulan literatur yang membahas isu hoaks, cyberbullying, dan literasi digital di kalangan peserta didik; (2) reduksi dan kategorisasi data untuk menyaring informasi sesuai fokus penelitian; (3) analisis isi guna menemukan pola pemikiran terkait peran PKn dalam meningkatkan literasi digital; serta (4) penarikan kesimpulan yang menyintesis hasil kajian teoretis. Misalnya, dari literatur yang menyoroti kasus penyebaran hoaks di kalangan pelajar, penelitian ini mengaitkannya dengan strategi pembelajaran PKn berbasis nilai Pancasila sebagai filter moral. Dengan metode ini, artikel berusaha memberikan sintesis yang komprehensif mengenai peran PKn dalam membangun literasi digital peserta didik di era globalisasi media sosial.

3. Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Basis Nilai Pancasila

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berfungsi sebagai sarana utama penguatan nilai moral dan karakter bangsa. Dalam konteks globalisasi teknologi, PKn tidak hanya mengajarkan aspek kognitif, tetapi juga menekankan internalisasi nilai Pancasila agar peserta didik memiliki pedoman moral yang kokoh. Nilai Pancasila menjadi dasar untuk membentuk sikap yang sesuai dengan jati diri bangsa di tengah derasnya arus digitalisasi (Yemima et al., 2025). Nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan filter dalam menghadapi dinamika interaksi digital. Misalnya, sila kedua mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia, yang sangat relevan untuk mencegah tindakan cyberbullying atau ujaran kebencian. Melalui pembelajaran PKn, siswa diajak memahami bahwa interaksi di media sosial harus tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (Furnamasari et al., 2024).

Selain itu, sila ketiga tentang persatuan Indonesia berperan penting dalam ruang digital yang sarat perbedaan opini. PKn menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa meskipun terjadi perdebatan di media sosial. Dengan pemahaman ini, peserta didik tidak mudah terprovokasi oleh isu yang memecah belah, tetapi justru menjadikan perbedaan sebagai sarana memperkuat persatuan (Peran Pancasila di Era Digital, 2025). Penguatan nilai Pancasila

melalui PKn juga melatih siswa untuk berpikir kritis terhadap informasi digital. Peserta didik tidak hanya dilatih memverifikasi data, tetapi juga mempertimbangkan apakah konten yang beredar selaras dengan nilai kemanusiaan dan persatuan. Literasi digital yang berpijak pada Pancasila menjadikan siswa lebih bijak dalam mengakses, menyaring, dan membagikan informasi di media sosial (Penguatan Literasi Digital, 2024).

Lebih jauh, nilai Pancasila juga berfungsi sebagai pemandu dalam membentuk pola pikir dan perilaku digital yang demokratis. Misalnya, sila keempat menekankan pentingnya musyawarah, yang dapat diterapkan dalam diskusi daring dengan cara menghargai pendapat orang lain. Sementara sila kelima mengajarkan pentingnya keadilan, yang dapat dipraktikkan dengan menghindari penyebaran informasi yang bias atau merugikan pihak tertentu (Armianti et al., 2024). Dengan demikian, PKn sebagai basis nilai Pancasila berperan strategis dalam membangun literasi digital peserta didik. Pancasila tidak hanya menjadi materi hafalan, tetapi dihidupkan melalui praktik nyata seperti simulasi diskusi media sosial, analisis kasus hoaks, hingga proyek literasi digital di sekolah. Hal ini memastikan peserta didik tidak hanya melek teknologi, tetapi juga berkarakter kuat dalam menghadapi tantangan globalisasi media sosial (Yemima et al., 2025).

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Penguatan Literasi Digital Kritis

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam melatih peserta didik berpikir kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial. Arus informasi yang cepat sering kali disertai dengan hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian. Melalui pembelajaran PKn, siswa diajak menyadari pentingnya sikap hati-hati sebelum menerima atau menyebarkan informasi digital. Dengan demikian, PKn membantu membangun kemampuan literasi digital yang berbasis pada nilai kritis dan tanggung jawab sosial (Rahayu et al., 2023). Pembelajaran berbasis kasus menjadi salah satu metode efektif dalam penguatan literasi digital kritis. Guru PKn dapat menghadirkan kasus aktual, seperti hoaks politik atau berita palsu terkait isu sosial, lalu meminta siswa menganalisis kebenarannya. Melalui proses ini, siswa terbiasa melakukan verifikasi fakta dan membandingkan berbagai sumber informasi. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi studi kasus dalam PKn efektif membentuk kesadaran siswa terhadap bahaya disinformasi (Alhudawi, 2024).

Selain berbasis kasus, pendekatan diskusi kelompok juga relevan untuk membangun literasi digital kritis. Guru dapat memfasilitasi debat atau forum diskusi daring mengenai isu kontemporer, di mana siswa dilatih untuk mengajukan argumen dengan dasar data yang valid. Aktivitas ini mendorong peserta didik agar tidak hanya menjadi konsumen pasif informasi, tetapi juga produsen pengetahuan yang bertanggung jawab. Literasi digital yang kritis membutuhkan latihan reflektif seperti ini untuk mengasah daya analisis siswa (Nugraha, 2023). Di sisi lain, PKn juga dapat mengajarkan siswa tentang konsekuensi sosial dari penyebaran informasi palsu. Dengan menanamkan pemahaman bahwa hoaks dapat memicu konflik, menimbulkan kebencian, dan merusak kerukunan, siswa akan lebih berhati-hati dalam aktivitas digitalnya. Nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, menjadi filter moral yang relevan untuk menilai apakah suatu konten layak disebar atau tidak. Kesadaran ini memperkuat literasi digital siswa dalam kerangka karakter bangsa (Furnamasari et al., 2024).

Selain itu, pembelajaran PKn dapat dikaitkan dengan praktik literasi digital melalui proyek berbasis teknologi. Misalnya, siswa diminta membuat kampanye anti-hoaks di media sosial sekolah atau membuat konten kreatif yang mengedukasi tentang literasi digital. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga melatih keterampilan praktis siswa dalam menghadapi tantangan era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi

berbasis proyek mampu memperkuat sikap kritis sekaligus kolaboratif siswa (Armianti et al., 2024). Dengan demikian, penguatan literasi digital kritis melalui PKn sangat penting untuk membekali peserta didik menghadapi derasnya arus informasi global. PKn bukan hanya transfer pengetahuan tentang politik dan hukum, tetapi juga wahana untuk membentuk generasi yang kritis, cerdas, dan berkarakter dalam bermedia sosial. Literasi digital yang dikembangkan melalui PKn akan menjadikan siswa lebih selektif, reflektif, dan etis dalam menggunakan teknologi (Yemima et al., 2025).

Pembentukan Kewargaan Digital Bertanggungjawab

Konsep *digital citizenship* menekankan bahwa setiap aktivitas di dunia maya merupakan bagian dari kehidupan publik yang tunduk pada norma sosial, hukum, dan etika. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan dalam membentuk kesadaran siswa mengenai pentingnya tanggung jawab saat berinteraksi secara digital. Peserta didik dibimbing untuk tidak hanya memahami hak, tetapi juga kewajiban mereka sebagai warga negara di ruang digital (Rahayu et al., 2023). Salah satu aspek penting dari kewargaan digital adalah sikap toleransi terhadap perbedaan. Media sosial sering menjadi arena munculnya konflik akibat perbedaan pandangan politik, budaya, atau agama. Melalui pembelajaran PKn, siswa dapat memahami bahwa menghormati keberagaman adalah bagian dari penerapan nilai Pancasila, khususnya sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Hal ini memperkuat kemampuan mereka untuk bersikap bijak dalam menghadapi perbedaan di dunia maya (Nugraha, 2023).

Selain toleransi, kewargaan digital juga mencakup rasa tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan privasi. Siswa perlu menyadari bahwa berbagi informasi pribadi secara sembarangan dapat menimbulkan risiko serius. PKn dapat memberikan pemahaman tentang perlunya kehati-hatian dalam aktivitas digital, serta membiasakan peserta didik untuk menjaga data diri dan menghormati privasi orang lain (Furnamasari et al., 2024). Kewargaan digital bertanggung jawab juga diwujudkan melalui komunikasi yang santun dan konstruktif. Di ruang digital, banyak terjadi ujaran kebencian yang merusak keharmonisan sosial. PKn mendorong siswa untuk menginternalisasi nilai kemanusiaan dan persatuan dalam setiap interaksi daring. Dengan demikian, mereka dapat membangun identitas digital yang mencerminkan warga negara yang demokratis dan beradab (Alhudawi, 2024).

Implementasi konsep ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi pembelajaran, seperti simulasi debat daring atau proyek literasi digital. Melalui aktivitas tersebut, siswa tidak hanya belajar teori tentang kewargaan digital, tetapi juga mempraktikkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya, peserta didik menjadi lebih reflektif dan kritis dalam memanfaatkan teknologi untuk tujuan positif (Armianti et al., 2024). Dengan demikian, pembelajaran PKn berkontribusi besar terhadap pembentukan kewargaan digital yang bertanggung jawab. Identitas digital yang positif tercermin dari sikap toleran, bertanggung jawab, dan santun dalam berkomunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa PKn bukan hanya mata pelajaran tentang politik dan hukum, tetapi juga sarana membentuk warga negara yang mampu menjalani kehidupan digital dengan kesadaran etis dan tanggung jawab sosial (Yemima et al., 2025).

Strategi Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Literasi Digital

Agar lebih kontekstual, implementasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam literasi digital dapat dilakukan melalui berbagai strategi pembelajaran. Salah satu pendekatan yang efektif adalah pembelajaran berbasis kasus, di mana siswa diajak menganalisis isu aktual seperti hoaks pada saat pemilu atau ujaran kebencian di media sosial. Metode ini menghubungkan teori dengan realitas sehingga siswa mampu mengembangkan keterampilan

berpikir kritis (Rahayu et al., 2023). Selain berbasis kasus, pembelajaran berbasis proyek atau *project citizen* juga sangat relevan. Siswa dapat ditantang untuk merancang dan melaksanakan kampanye literasi digital di sekolah atau komunitas. Melalui pengalaman langsung, peserta didik tidak hanya memahami konsep literasi digital, tetapi juga berperan aktif dalam menyebarkan nilai-nilai positif di ruang publik digital. Penelitian menunjukkan metode ini efektif meningkatkan partisipasi aktif siswa (Alhudawi, 2024).

Strategi lain yang dapat diterapkan adalah simulasi dan debat kelas. Melalui kegiatan ini, siswa diberi kesempatan untuk melatih keterampilan argumentasi berdasarkan data valid serta belajar menghargai pendapat orang lain. Aktivitas diskusi kritis ini membantu membentuk sikap toleran dalam menghadapi perbedaan pandangan di media sosial, yang sejalan dengan sila keempat Pancasila (Nugraha, 2023). Kolaborasi lintas pihak juga penting dalam mendukung implementasi PKn yang kontekstual. Sekolah dapat bermitra dengan keluarga dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem literasi digital yang sehat. Peran orang tua dalam mendampingi anak serta kontribusi komunitas digital lokal menjadi faktor penentu dalam menanamkan nilai tanggung jawab dalam bermedia sosial (Furnamasari et al., 2024).

Selain itu, integrasi teknologi digital dalam pembelajaran PKn memperkuat relevansi materi dengan kehidupan nyata. Guru dapat memanfaatkan media digital, seperti platform pembelajaran daring atau media sosial kelas, sebagai ruang praktik literasi digital. Dengan demikian, siswa tidak hanya diajarkan teori, tetapi juga dibimbing untuk menggunakan teknologi secara kritis dan produktif (Armianti et al., 2024). Dengan berbagai strategi tersebut, PKn dapat berperan aktif dalam membentuk literasi digital peserta didik yang berlandaskan nilai Pancasila. Siswa tidak hanya mampu membedakan informasi benar dan palsu, tetapi juga mengembangkan sikap toleran, bertanggung jawab, dan demokratis di ruang digital. Implementasi ini memastikan bahwa PKn tetap relevan dengan tantangan globalisasi media sosial (Yemima et al., 2025).

Tantangan dan Peluang

Dalam praktiknya, penguatan literasi digital melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tidak lepas dari tantangan serius. Budaya populer global yang sering kali tidak sejalan dengan nilai etika lokal menjadi pengaruh kuat bagi generasi muda. Tren media sosial seperti viral content dan budaya instan kerap membuat siswa lebih fokus pada popularitas ketimbang nilai edukatif. Kondisi ini menjadi hambatan dalam menanamkan literasi digital yang berbasis Pancasila (Nugraha, 2023). Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan sebagian orang tua juga memperburuk situasi. Banyak orang tua yang kurang mampu memberikan pengawasan maupun teladan dalam penggunaan media sosial di rumah. Akibatnya, anak-anak lebih mudah terpapar hoaks, ujaran kebencian, atau konten negatif tanpa adanya filter keluarga. Kesenjangan literasi digital antar-generasi ini menjadi tantangan dalam pendidikan kewarganegaraan digital (Furnamasari et al., 2024).

Metode pembelajaran PKn yang masih dominan teoritis juga menjadi kendala tersendiri. Sering kali materi PKn hanya menekankan aspek kognitif tanpa dihubungkan dengan realitas digital siswa. Akibatnya, peserta didik kurang terampil dalam mengaplikasikan nilai Pancasila dalam interaksi media sosial. Padahal, praktik nyata sangat dibutuhkan untuk membentuk literasi digital yang kritis dan bertanggung jawab (Rahayu et al., 2023). Namun demikian, peluang besar juga terbuka lebar untuk memperkuat literasi digital melalui PKn. Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan kehidupan siswa. Melalui pendekatan ini, peserta didik dapat dilatih membuat kampanye

literasi digital, simulasi debat daring, atau proyek berbasis komunitas yang menanamkan nilai kewargaan digital (Alhudawi, 2024).

Selain kurikulum, dukungan pemerintah melalui program literasi digital nasional juga menjadi peluang penting. Program ini dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran PKn, sehingga siswa memperoleh wawasan yang lebih luas tentang tantangan sekaligus praktik baik penggunaan media digital. Kolaborasi dengan lembaga negara maupun komunitas digital semakin memperkaya pengalaman belajar siswa (Armianti et al., 2024). Akhirnya, potensi kolaborasi multi-pihak antara sekolah, keluarga, dan masyarakat harus dimanfaatkan secara optimal. Dengan adanya sinergi lintas sektor, internalisasi nilai kewargaan digital akan lebih efektif. Sekolah berperan sebagai fasilitator, keluarga sebagai pengawas, dan masyarakat sebagai ekosistem digital yang sehat. Kolaborasi ini akan memperkuat peluang membangun generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab di era globalisasi digital (Yemima et al., 2025).

4. Kesimpulan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan penting dalam membangun literasi digital peserta didik di era globalisasi media sosial. Nilai-nilai Pancasila, keterampilan berpikir kritis, serta kesadaran etis menjadi fondasi utama dalam membimbing siswa agar mampu memilah, memahami, dan menggunakan informasi secara bijak. Untuk itu, dibutuhkan strategi pembelajaran yang inovatif serta kolaborasi yang erat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem digital yang sehat. Penguatan peran PKn semakin mendesak dilakukan agar generasi muda tumbuh sebagai warganet yang cerdas, etis, dan beradab, sekaligus mampu menghadapi tantangan era digital dengan tetap berpegang pada identitas kebangsaan.

5. Daftar Pustaka

- Alhudawi, U. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menguatkan etika digital siswa. *Jurnal Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan*, 14(1), 1–10.
- Armianti, R., Yunita, S., & Dharma, S. (2024). Integrasi teknologi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(1), 55–63.
- Furnamasari, Y., Fauzy, A. R., & Rahmawati, D. (2024). Pendidikan Pancasila di era digital: Mengatasi tantangan moralitas dan etika. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 3(2), 44–52.
- Nugraha, H. S. (2023). Paradigma etika digital dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 120–134.
- Penguatan literasi digital melalui mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. (2024). *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1), 33–42.
- Peran Pancasila di era digital dalam mewujudkan penggunaan nilai-nilai Pancasila. (2025). *Jurnal Intekom*, 9(1), 77–85.
- Rahayu, I. D. A., Ulum, B., & Putra, A. E. P. (2023). Literasi digital dalam pembelajaran PKn berbasis saintifik untuk penguatan civic disposition mahasiswa. *Jurnal Media Informatika*, 6(3), 211–220.

Yemima, Q., Kisy Anabelg, Y. K., Hutagalung, N., Marpaung, P. A., Sihombing, M., & Tampubolon, E. (2025). Kesadaran beretika dalam era digital: Peran Pancasila sebagai kompas moral di kalangan pelajar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 9803–9811.